

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PONDOK KURASI

Gita Rania¹, Ananta Prathama²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia ^{1,2}

E-mail: gitaraniaa@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berinisiasi untuk semakin mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur melalui peluncuran Program Pondok Kurasi, dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM Offline serta mendorong National branding untuk produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Pondok Kurasi menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas Program Pondok Kurasi dalam memberdayakan pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Kurasi belum berhasil memberdayakan UMKM batik melalui Program Pondok Kurasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi perencanaan dapat mengidentifikasi potensi pelaku usaha, menganalisis kebutuhan pelaku usaha serta dapat merancang program sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kemudian dari sisi pelaksanaan telah memberikan pelatihan-pelatihan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku usaha. Namun dari sisi hasil masih belum memenuhi hasil yang diinginkan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari sisi evaluasi telah memenuhi monitoring dan evaluasi yang baik dengan memberikan pendampingan serta pelaksanaan evaluasi berkala setiap triwulan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Program Pondok Kurasi, UMKM.

ABSTRACT

The Provincial Government of East Java together with the Office of Industry and Trade of East Java Province took the initiative to further encourage the expansion of MSMEs in the East Java region through the launch of the Pondok Kurasi Program, with the aim of encouraging digitization (onboarding) for Offline MSMEs and encouraging National branding for superior MSME products on various marketplaces. This study aims to find out how the Pondok Kurasi Program shows its role as a facilitator for the Pondok Kurasi Program in empowering MSME actors. The method used in this research is qualitative research. The results of the study show that Pondok Kurasi has not been successful in empowering batik SMEs through the Pondok Kurasi Program. This can be seen from the planning side, it can identify the potential of business actors, analyze the needs of business actors and can design programs according to the needs of business actors. Then from the implementation side, training has been

provided as well as the facilities and infrastructure needed by business actors. However, in terms of results, it still does not meet the results desired by business actors. Meanwhile, in terms of evaluation, it has fulfilled good monitoring and evaluation by providing assistance and carrying out periodic evaluations every quarter.

Keywords: *Empowerment, Curation Cottage Program, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Laju penurunan jumlah penduduk adalah bagian dari indikator utama dalam keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri adalah upaya dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan pada kemampuan nasional. Pembangunan nasional salah satunya dengan mewujudkan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat (Sumadi & Prathama, 2021). Minimnya tingkat pengangguran, kesempatan bekerja yang luas, dan minimnya jumlah kemiskinan menandakan bahwa tercapainya sebuah pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi masa depannya. Pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan karena pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata, juga tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, demokratis dan berkeadilan maka akan menimbulkan pembangunan ekonomi yang rapuh (Ir. Braman Setyo, 2016).

Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Lembaga *think-tank* Amerika Center for Economics and Business Research (CEBR) Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2035 (Sindonews.com, 2021). Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi penunjang perekonomian Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia saat ini. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuannya dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan meningkat hingga 60,4% dari total investasi (djn.kemenkeu.go.id, 2021). Melihat hal tersebut, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM khususnya usaha mikro yang sangat banyak dan tingkat penyerapan tenaga kerja sangat besar.

Namun, banyaknya jumlah UKM di Indonesia pasti terdapat tantangan yang ada. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau usaha kecil menengah (UKM) dalam pertumbuhan

ekonomi negara dinilai penting. Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang mandiri. Usaha ini dijalankan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki, dikuasai atau berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan menengah atau besar dan yang memenuhi kriteria lainnya.

Pertumbuhan UKM yang terdapat di Jawa Timur memperlihatkan adanya pertumbuhan yang baik (Anugerah & Nuraini, 2021). Provinsi Jawa Timur jika dilihat dari letak geografisnya, berada pada kawasan yang terbilang cukup strategis yaitu berada di tengah Indonesia sehingga memiliki potensi untuk membangun industri atau usaha. Hal tersebut menyebabkan banyaknya usaha-usaha yang tersebar di Jawa Timur salah satunya UKM. Data berikut menggambarkan jumlah UKM di Jawa Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2020.

Tabel. 1 Jenis Usaha di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019 – 2020

No.	Jenis	2019	2020
1	Usaha Kecil	794.606	795.797
2	Usaha Menengah	23.094	23.128
3	Usaha Besar	1.228	1.231
4	Total	818.928	820.156

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Usaha Kecil

Menengah di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan jumlah usaha. Dari tahun 2017 jumlah UKM yang tersebar di Provinsi Jawa timur sebanyak 814.848 unit usaha dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 816.804 unit usaha. Kemudian dari tahun 2018 menuju 2019, jumlah UKM juga mengalami kenaikan menjadi 818.928 unit usaha. Pada tahun 2020 jumlah UKM juga mengalami kenaikan yakni 820.156 unit usaha. Dengan demikian banyaknya jumlah UKM di Provinsi Jawa Timur, diharapkan para pelaku UKM dan UMKM untuk terus meningkatkan produktivitasnya usaha serta ide nya agar tetap *update* dengan perkembangan terkini.

Pemerintah memiliki target yaitu 30 juta UMKM masuk pasar digital hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sejak Mei 2020 hingga Juni 2021 telah ada 6,5 juta UMKM, sehingga total menjadi 14,5 juta unit yang telah on boarding *e-commerce*. Hal tersebut membuat Pemerintah menaruh focus pada UMKM agar produk lokal dapat merambah ke sektor global.

Melihat zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin hari semakin berkembang. Namun pada kenyataannya, produk hasil UMKM Indonesia dinilai masih sulit ditembus di pasar ekspor. Pemerintah telah memberikan fokus pada UMKM agar

produk-produk lokal dapat merambah ke pasar global.

Pemerintah selalu mendorong produk-produk UMKM agar mampu merambah pasar global, namun terhalang dengan banyaknya kesulitan yang dialami para pelaku UMKM. UMKM menalami kesulitan yakni dalam melakukan ekspor yang bermula pada masalah legalitas. Kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap legalitas, pentingnya nomor induk usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP), izin prosedur ekspor-impor membuat pelaku UMKM kesulitan dalam mengeksport produknya ke luar negeri, maupun hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dana, masih banyak UMKM nasional yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan nasional, serta minimnya modal dan bangunan juga menjadi penyebab pelaku UMKM kesulitan untuk berkembang. Ketiga, kurangnya bantuan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Keempat, kurangnya standarisasi produk. Terjadinya inkonsistensi dalam produksi dan kualitas produknya dapat menjadi kendala bagi UMKM untuk memasuki pasar global. Yang terakhir ini masih terkait dengan pemasaran yang terbatas dan kurangnya peluang pasar. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM yang bermodal kecil sulit memasarkan produknya di luar negeri.

Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena adanya kendala dalam standar mutu (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Melihat adanya kendala yang dialami pelaku UMKM, maka pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memberikan perhatiannya kepada pelaku UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya membantu pelaku UMKM mengatasi kendala tersebut. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya membantu para pelaku UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dengan meluncurkan Program Pondok Kurasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk lebih mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur, yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (*onboarding*) bagi UMKM *Offline* serta mendorong *National branding* untuk produk UMKM unggulan di berbagai *marketplace*.

Dalam Program Pondok Kurasi, terdapat beberapa tahapan yakni proses kurasi produk dan pemasaran. Kurasi produk dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan yaitu banyaknya permasalahan kualitas produk dan kemasan dari para pelaku usaha UMKM di pasaran, sehingga sangat dibutuhkan adanya tahapan kurasi dari pihak-pihak terkait yang memiliki keahlian khusus terutama dari para penggiat UMKM. Juga masih

banyak produk UMKM yang belum memiliki legalitas. Dengan kurasi produk menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi konsumen serta keberlangsungan usaha dari produsen sendiri, sehingga produsen UMKM perlu mendapatkan pembinaan dan kurasi produk sebelum dipasarkan. Secara singkat program ini merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaku IKM/UKM untuk bisa naik kelas sehingga pelaku UMKM dibantu untuk mengkurasi produknya agar mampu merambah pasar global.

Secara singkat program ini merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaku IKM/UKM untuk bisa naik kelas sehingga pelaku UMKM dibantu untuk mengkurasi produknya agar mampu merambah pasar global. Proses yang dilakukan untuk bisa mengakses Pondok Kurasi ini yaitu dengan seleksi kelengkapan administrasi, kemudian bagi pelaku UMKM yang lolos akan diikutkan *business meeting*, Kemudahan mengakses Bangga Buatan Indonesia (BBI), Misi dagang, sertifikasi merk dan lain-lain. Hingga pada kemudian kurator akan menyeleksi dan Pelaku UMKM tersebut mendapatkan pendampingan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memiliki delapan (8) UPT sebagai lembaga untuk melakukan kurasi UKM. Perlu pengembangan Pondok

Kurasi sebagai sekretariat dan tempat kurasi dan perlu difungsikan agar kegiatan kurasi dapat berjalan lancar sesuai sub koor wilayah (korwil) yang telah ditentukan. Terdapat banyak jenis UMKM yang didaftarkan diantaranya terdapat produk *handycraft*, produk makanan, produk *fashion*, serta *home decor*, dan lain lain. Berikut adalah produk-produk yang lolos proses kurasi:

Tabel. 2 Produk UKM yang lolos proses kurasi

No.	Produk UKM	Jumlah
1.	Makanan dan Minuman	53 Pelaku Usaha
2.	<i>Handycraft</i>	21 Pelaku Usaha
3.	<i>Fashion</i>	12 Pelaku Usaha
4.	Batik	10 Pelaku Usaha
5.	<i>Homedecor</i>	2 Pelaku Usaha
	Total	98 Pelaku Usaha

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dalam hal ini untuk UKM yang tidak lolos proses kurasi akan di bina ulang sesuai dengan tahap di mana pelaku UKM tidak diloloskan. Kemudian untuk UKM lolos proses kurasi akan diprioritaskan untuk mengikuti promosi baik dalam dan luar negeri di Gerai Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Expo Center.

Seperti yang sudah diketahui bahwa batik merupakan ciri khas kain dari bangsa Indonesia. Unit usaha

kerajinan batik juga merupakan salah satu aspek ekonomi yang termasuk ke dalam masyarakat, khususnya golongan menengah dan bawah dalam usaha mencapai kesejahteraan. Kekuatan budaya yang terkandung dalam batik sendiri mampu meningkatkan nilai tambah produk di bidang *fashion* yang dinilai berpotensi untuk dipasarkan hingga ke luar negeri, sehingga sangat berperan penting bagi perekonomian nasional. Dengan adanya produk batik yang tersebar di Jawa Timur ini diharapkan dukungan berupa fasilitas program pondok kurasi dan melibatkan aspek manusia, pemasaran, dan kelembagaan akan ini dapat terus berupaya mengembangkan serta menjadi pendukung keberadaan industri batik nasional sehingga mampu bersaing di pasar global Hariyoko et al., (2021).

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Empowerment adalah sebuah diksi Bahasa Inggris yang memiliki arti yakni “pemberkuasaan” yang dapat diartikan sebagai pemberiapaan ataupun peningkatan terhadap “kuasa” untuk masyarakat yang tidak beruntung (Wahyuni, 2018). Pengertian pemberdayaan sendiri adalah proses menuju berdaya. Pada kata proses tersebut dilakukan sebuah langkah-langkah berkelanjutan untuk membantu merubah nasib dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Senada dengan pernyataan tersebut menurut Pearson dalam Hariyoko et al., (2021)

konsep pemberdayaan adalah ketika seseorang mendapat keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk merubah kehidupannya dan kehidupan orang lain disekitarnya.

Bersamaan dengan Mardikanto & Soebianto, (2019), perubahan ekonomi, sosial maupun politik adalah proses dari pemberdayaan. tahapan tersebut kemudian dilalui dengan belajar bersama yang partisipatif dengan upaya terbentuknya perilaku dari individu, yang berlanjut pada proses pembangunan yang membuat terciptanya sebuah kehidupan mandiri, berdaya, dan sejahtera berkelanjutan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sangatlah diperlukan. Namun jika dalam proses tersebut, masyarakat dituntut kesediannya untuk banyak mengorbankan hak-hak nya sebagai masyarakat (harus tunduk), maka proses tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pemberdayaan. Jhon M Chen dan Norman T. Uphoff yang dikutip oleh (Khakim, 2016) menyebutkan bahwa dalam melakukan proses pemberdayaan terdapat empat tahapan yakni mengenai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kemudian tahap hasil yang diperoleh dari pelaksanaan lalu tahap terakhir adalah evaluasi. Untuk mengukur

proses pemberdayaan dapat menggunakan beberapa tahap yang diantaranya adalah:

1. Tahap Perencanaan
Menyusun rencana program kerja bersama agar mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Tahap Pelaksanaan
Ketika penyusunan program kerja telah disepakati, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja.
3. Hasil
Menunjukkan suatu perolehan karena aktivitas atau proses yang menghasilkan perubahan fungsional.
4. Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengetahui hasil kinerja suatu program dengan menggunakan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan sistem pencapaian tujuan dari program tersebut.

Menurut Karsidi dalam (Khakim, 2016) dalam proses pemberdayaan UMKM, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Identifikasi potensi
Identifikasi potensi yang dimaksud dalam hal ini adalah menelaah karakteristik yang dimiliki oleh UMKM dan lingkungan internal terkait dengan usaha yang dimiliki dan lingkungan eksternal dari UMKM. Proses identifikasi melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholder* maupun instansi yang terkait.
2. Analisis kebutuhan

Di tahap analisis kebutuhan ini dilakukan oleh perwakilan dari pelaku usaha UMKM yang difasilitasi oleh instansi terkait atau perguruan tinggi baik swasta maupun negeri tentang berbagai kebutuhan produk dan pasar. Dengan ini diharapkan tahap ini mampu mendorong terciptanya manifestasi kebutuhan pelaku usaha UMKM agar dapat mencapai tujuan.

3. Rencana program bersama
Setelah kebutuhan telah ditentukan, hal selanjutnya yakni menyusun sebuah rencana program kerja bersama untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi fasilitator adalah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri serta instansi yang terkait.
4. Pelaksanaan program kerja bersama
Ketika penyusunan program kerja telah disepakati, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja.
5. Monitoring dan evaluasi
Pada tahap ini monitoring dan evaluasi memiliki fungsi untuk dapat memantau serta mengetahui hasil dari pelaksanaan program kerja bersama, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi jika permasalahan akan timbul.

Program Pondok Kurasi

Pondok Kurasi adalah program milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa timur yang berfungsi sebagai media bagi IKM/UKM Jawa Timur untuk mengkau pasar yang lebih luas melalui proses verifikasi terintegrasi produk sesuai standar yang diberlakukan sehingga tercipta produk yang berkualitas, teruji dan selektif. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur bermaksud untuk mengembangkan Pondok Kurasi pada 8 UPT Sub Korwil Provinsi Jawa Timur melalui kurasi produk (penilaian kualitas produk) bagi IKM/UKM nya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2021). Kurasi adalah suatu langkah kerja dan/atau kegiatan dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kegiatan UMKM. Sedangkan kurasi produk adalah proses penyeleksian terhadap produk UKM/IKM yang telah didaftarkan sebelum produk tersebut dapat di ekspor. Dengan kata lain kurasi produk adalah penilaian kualitas produk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Exporthub akan mengkurasi produk UKM/IKM dengan memberikan mutu atau level bagi kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar global. Tujuan pembinaan dan kurasi produk adalah untuk memverifikasi mutu dan meningkatkan mutu produk jika dibutuhkan, termasuk kualitas kemasan produk yang lebih menarik dan tetap menjaga fungsi kemasan tersebut.

Kurasi produk dilakukan untuk pemeliharaan dan pengawasan terhadap kegiatan IKM/UKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan dengan cara kuantitatif atau menggunakan prosedur-prosedur statistik lainnya. Objek dari penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang terdaftar pada Program Pondok Kurasi. Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya yang sangat berkaitan dengan judul penelitian (Sugiyono, 2019). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode versi Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), kondensasi data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion : drawing/verifying*).

Narasumber pada penelitian ini meliputi Koordinator Program Pondok Kurasi, tim pelaksana Program Pondok Kurasi, serta pelaku UMKM yang terdaftar Program Pondok Kurasi. Peneliti menggunakan uji keabsahan triangulasi dikarenakan triangulasi

dipandang sebagai cara yang ideal untuk menghapus perbedaan-perbedaan konstruksi realitas yang ada dalam konteks penelitian ketika menghimpun data terkait segala kegiatan dan hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Dengan kata lain penggunaan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi temuannya melalui cara membandingkan dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pemberdayaan masyarakat perlulah untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan, memampukan, dan membangun masyarakat serta memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik. Menurut Jhon M. Choen dan Norman T. Uphoff yang dikutip oleh Khakim (2016) dalam melakukan proses pemberdayaan terdapat empat tahapan yakni mengenai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kemudian tahap hasil yang diperoleh dari pelaksanaan lalu tahap terakhir adalah evaluasi.

Perencanaan

Menurut Khakim (2016) perencanaan merupakan suatu kegiatan penetapan tujuan yang hendak dicapai, yang mana dalam tahap ini bertujuan untuk dapat memperbaiki program

kerja yang sudah ada sebelumnya bahkan dapat memunculkan program kerja baru yang sesuai dengan kondisi pelaku UMKM dilapangan. Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti identifikasi potensi yang ada, analisis kebutuhan pelaku usaha, hingga rencana program yang sesuai dengan pelaku usaha itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Maharani (2017) bahwa sebuah program kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dan target pada masyarakat sasaran sehingga kebijakan tersebut akan tepat pada sasaran yang kemudian dapat dinilai berhasil.

Dalam mengidentifikasi potensi pelaku UMKM khususnya UMKM batik agar produknya dapat dijual ke luar negeri terdapat beberapa tahapan yakni dengan mendaftar ke Program Pondok Kurasi melalui online maupun offline yang kemudian akan di seleksi oleh para kurator kelengkapan legalitas serta kemasan produknya hingga akhirnya dapat lolos kurasi. Dengan adanya seleksi perijinan ini masyarakat butuh jaminan bahwa produk yang mereka kenakan sudah benar benar layak edar.

Gambar. 1 Alur Proses Kurasi IKM



Sumber : Galeri Pondok Kurasi, 2021

Untuk potensi ekspor sendiri dari komoditi batik dalam proses kurasi harus dilihat dari kedetailan dan kerapian dari motif batik itu sendiri. Serta dalam mengidentifikasi potensi produk pelaku usaha batik, para kurator harus memiliki semua keahlian dalam mengkurasi, dengan kata lain Sumber Daya Manusia yang dimiliki sudah berkualitas karena sudah memiliki sertifikat dari BNSP.

Selain mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM batik, pada tahap perencanaan ini juga memerlukan analisis kebutuhan para pelaku usaha. Salah satu analisis kebutuhan yang dapat dilakukan adalah melihat kondisi pangsa pasar yang ada. Dalam hal ini untuk pangsa pasar di luar negeri terkesan sulit, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Ada beberapa produk yang memang layak dan berpotensi untuk dijual ke luar negeri salah satunya adalah produk Batik. Agar produk batik dapat ke pasar internasional dibutuhkan beberapa cara yaitu melalui pameran yang disediakan oleh pemerintah dan melalui proses handcarry. Dengan adanya ini peluang produk batik agar dapat ekspor ke luar negeri akan meningkat sehingga batik akan lebih dikenal baik dalam maupun luar negeri.

Kemudian setelah mengidentifikasi potensi serta melakukan analisis kebutuhan, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun rancangan program. Melalui rancangan program akan tergambar apa saja kegiatan yang akan dilakukan.

Serta dalam rancangan ini harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan para pelaku usaha batik. Dibentuknya Program Pondok Kurasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk milik Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menargetkan digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan produk dan kualitas IKM/UKM. Program Pondok Kurasi ini dinilai bermanfaat untuk mendukung pemulihan ekonomi di Jawa Timur melalui pengembangan produk UMKM batik di Jawa Timur agar siap menembus ke pasar Internasional yang mana berbeda dengan program IKM Paripurna yang pangsa pasarnya hanya di pasar dalam negeri saja. Serta untuk pelaku usaha batik yang siap ekspor harus memiliki beberapa sertifikasi yang dibutuhkan oleh para pembeli dan harus memenuhi standar khusus untuk unggul dalam ekspor. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan tahapan perencanaan dari Program Pondok Kurasi telah tercapai

Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Khakim (2016) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mencapai rencana program. Program Pondok Kurasi adalah salah satu wadah dalam melakukan proses kurasi bagi produk-produk UMKM. Dalam pelaksanaan Program Pondok Kurasi tidak luput dari sebuah kendala. Kendala-kendala yang dihadapi adalah pandemi Covid-19. Pandemi menimbulkan banyak kendala dalam

melakukan proses kurasi, di mana para kurator kesulitan untuk menyeleksi produk melalui online. Namun saat ini proses kurasi dapat dilakukan secara offline yakni dengan mendatangi stand untuk kurasi dan para kurator dapat menilai produk yang dibawa.

Dalam pelaksanaan Program Pondok Kurasi ini terdapat pula pelatihan kepada para pelaku usaha batik mulai dari pelatihan kemasan, pengolahan kualitas produk, hingga pemilihan bahan baku yang baik. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga memberikan sarana dan prasarana berupa pameran, merk, fasilitasi kemasan, serta promosi pameran. Adanya sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menunjang pelaku usaha khususnya pelaku usaha batik agar dapat meningkatkan kualitas serta mengembangkan produk juga agar dapat meningkatkan daya saing sehingga produk dapat terjual hingga ke luar negeri dan dapat memperluas jaringan pemasaran para pelaku usaha batik. Meskipun masih terdapat kendala seperti adanya pandemi Covid-19 namun proses kurasi yang dilakukan masih tetap berjalan. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa Program Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan pelaksanaan dengan baik meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan baik.

Hasil

Hasil disini dapat diartikan dengan menunjukkan suatu perolehan

karena aktivitas atau proses yang menghasilkan perubahan fungsional (Khakim, 2016). Dari tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kepada pelaku usaha melalui berbagai macam kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, hasil yang didapat dari tahap pelaksanaan ini dapat dilihat bahwa Pondok Kurasi sendiri hadir sebagai media bagi UKM di Jawa Timur untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui proses verifikasi produk standar yang diberlakukan sehingga tercipta produk yang berkualitas, teruji dan selektif. Namun diketahui bahwa bahwa Program Pondok Kurasi ini baru berjalan pada awal tahun 2021 dan dibagi ke 8 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Hasil yang didapat dari pelaksanaan Program Pondok Kurasi kepada pelaku UMKM dapat dilihat dari omset para pelaku UMKM batik. Adanya Program Pondok Kurasi belum terasa hasil penjualannya, namun bagi sebagian pelaku usaha batik ada yang sudah merasa hasil omset tersebut meningkat.

Selain melihat dari omset penjualan, hasil yang diperoleh yakni terkait dengan orientasi ekspor para pelaku usaha batik. Seperti yang diketahui bahwa Program Pondok Kurasi ini program yang baru diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, jadi untuk orientasi ekspor kepada pelaku usaha batik masih belum terlihat perkembangannya. Namun dengan

orientasi ekspor ini, beberapa pelaku usaha batik telah menjualkan produknya ke luar negeri.

Gambar. 2 Pemotretan Hariyani Batik Tulis Ambulu di New York



Sumber: Arsip milik Hariyani Batik Tulis Ambulu, 2020

Dengan adanya ekspor ini membawa dampak baik yaitu dapat membuka peluang pasar baru di luar negeri serta perekonomian di Indonesia menjadi naik sebab barang yang dihasilkan bisa tersalurkan. Hal tersebut tentunya masih menjadi sebuah bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dimana terdapat beberapa pelaku usaha batik yang dapat menjualkan produknya ke luar negeri namun justru mengalami penurunan omset penjualan. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa Program Pondok Kurasi belum memenuhi hasil yang diinginkan oleh para pelaku usaha dikarenakan terdapat beberapa pelaku usaha batik yang terbilang dapat melakukan promosi

hingga pameran ke luar negeri namun omset penjualannya tidak terlihat peningkatan.

Evaluasi

Evaluasi menurut (Anggara, 2018) diartikan dengan mengevaluasi isi kebijakan dan program sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (effect) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapai (kesesuaian antara cara dan tujuan). Hal tersebut berlaku pula dalam mengevaluasi Program Pondok Kurasi yang dalam tahap ini terdapat monitoring dan evaluasi. Menurut Fithriyah yang dikutip oleh Khakim (2016) monitoring dan evaluasi memiliki fungsi untuk dapat memantau serta mengetahui hasil dari pelaksanaan program kerja bersama, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi jika permasalahan akan timbul.

Pada tahap monitoring dan evaluasi pada Program Pondok Kurasi ini dapat dilihat dengan bagaimana para kurator memberikan pendampingan kepada pelaku usaha batik mulai dari menawarkan pembuatan merk, hingga fasilitasi kemasan serta pendampingan pelatihan kualitas produk. Sedangkan untuk tahap evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur masih melakukan evaluasi dan dilakukan secara berkala selama 3 bulan sekali. Evaluasi ini bertujuan menjaga konsistensi dari kinerja pelaksanaan Program Pondok kurasi agar dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada. Dengan adanya evaluasi program ini diharapkan para pelaku usaha batik dapat merasa berdaya sehingga potensi dari pelaku usaha dapat berkembang. Namun untuk beberapa pelaku usaha batik merasa belum berdaya dengan adanya Program Pondok Kurasi ini, alasannya karena tidak adanya kelanjutan dari proses kurasi dan merasa kurang adanya promosi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa Program Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan monitoring dan evaluasi dengan baik meskipun masih terdapat pelaku usaha batik yang merasa belum berdaya dengan adanya Program Pondok Kurasi namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pendampingan dalam segi promosi.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian telah yang dilakukan penulis, melalui pengukuran berdasarkan 4 tahapan proses pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Setelah melakukan penelitian dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan Program Pondok Kurasi ini telah terlaksana. Karena dalam mengidentifikasi potensi pelaku usaha batik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah memberikan kemudahan dalam perijinan serta telah memberikan wadah bagi para UMKM batik yang

ingin produknya berorientasi ekspor. Kemudian kurator yang dimiliki pun telah memiliki semua keahlian dan telah bersertifikat dari BNSP. Dalam menganalisis kebutuhan pelaku usaha batik, dinas juga memberikan wadah seperti pameran yang memberikan peluang ekspor menjadi tinggi. Sehingga dibentuklah Program Pondok Kurasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk milik Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menargetkan digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan produk dan kualitas IKM/UKM.

Kemudian Menurut hasil dan pembahasan dapat dihasilkan sebuah kesimpulan yaitu Program Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan pelaksanaan dengan baik. Pada pelaksanaan Program Pondok Kurasi ini terdapat pula pelatihan kepada para pelaku usaha batik mulai dari pelatihan kemasan, pengolahan kualitas produk, hingga pemilihan bahan baku yang baik. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga memberikan sarana dan prasarana berupa pameran, merk, fasilitasi kemasan, serta promosi pameran.

Namun, Program Pondok Kurasi dinilai masih belum memenuhi hasil yang diinginkan oleh para pelaku usaha batik dikarenakan terdapat beberapa pelaku usaha yang terbilang dapat melakukan promosi hingga pameran ke luar negeri, namun omset penjualannya tidak terlihat peningkatan.

Setelah itu, Program Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan monitoring dan evaluasi dengan baik. Monitoring yang dilakukan para kurator yaitu dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mulai dari menawarkan pembuatan merk, hingga fasilitasi kemasan serta pendampingan pelatihan kualitas produk. Dan kegiatan evaluasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan secara berkala selama 3 bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran UMKM Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 27–41.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (2021). *Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pengembangan Pondok Kurasi Di Jawa Timur*.
- djn.kemenkeu.go.id. (2021). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
<https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Junaidi, M. A. (2021). Pemberdayaan UMKM Batik Tulis Di Kampung Batik Jetis Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–10.
- Ir. Braman Setyo, M. S. (2016). Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. *Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017, 2006*, 1–17.
- Khakim, M. N. (2016). Studi Deskriptif Tentang Strategi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kampung Binaan Kue Kelurahan Penjaringan sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(1).
- Maharani, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Distribusi Program Raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), 451–457.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif*

- Kebijakan Publik* (Kelima). Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2021).
- Sindonews.com. (2021). *Indonesia Menuju Ekonomi Terbesar Dunia*.
<https://ekbis.sindonews.com/read/398392/34/indonesia-menuju-ekonomi-terbesar-dunia-1618495440>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1).